

## **PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENGANGGURAN DI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2017-2021**

**U. Sulia Sukmawati**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: urai\_suliasukmawati@yahoo.com

**Rindiani**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: rindiani7896@gmail.com

**Tika Septia Ananda**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: tikaseptiananda@gmail.com

### **ABSTRACT**

This study aims to determine whether the minimum wage affects the unemployment rate in West Kalimantan in the period 2017-2021. This study applies a quantitative approach to the type of library research. The data are secondary from the website of the Central Agency on Statistics (BPS) with the type of panel data. The panel data is a combination of time series data for the 2017-2021 period and cross-section data from 12 districts and 2 cities in West Kalimantan. The data in this study are the minimum wage as the independent variable and the unemployment rate as the dependent variable. The data analysis applies simple linear regression with SPSS. The results of this study indicate that the minimum wage does not affect the unemployment rate in West Kalimantan in the 2017-2021 period. This can be seen from the t-test value of 0.083 which exceeds the 5% significance value.

**Keywords:** Minimum wage, unemployment, West Kalimantan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upah minimum memengaruhi jumlah pengangguran di Kalimantan Barat periode pada 2017-2021. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari website Badan Pusat Statistik dengan jenis data panel. Data panel tersebut merupakan gabungan dari data *time series* yaitu periode 2017-2021 dan data *cross section* yaitu 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data dalam penelitian ini berupa data upah minimum sebagai variabel bebas dan jumlah pengangguran sebagai variabel terikat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak memengaruhi jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021. Hal ini terlihat dari besarnya nilai uji t 0,083 yang melebihi nilai signifikansi 5%.

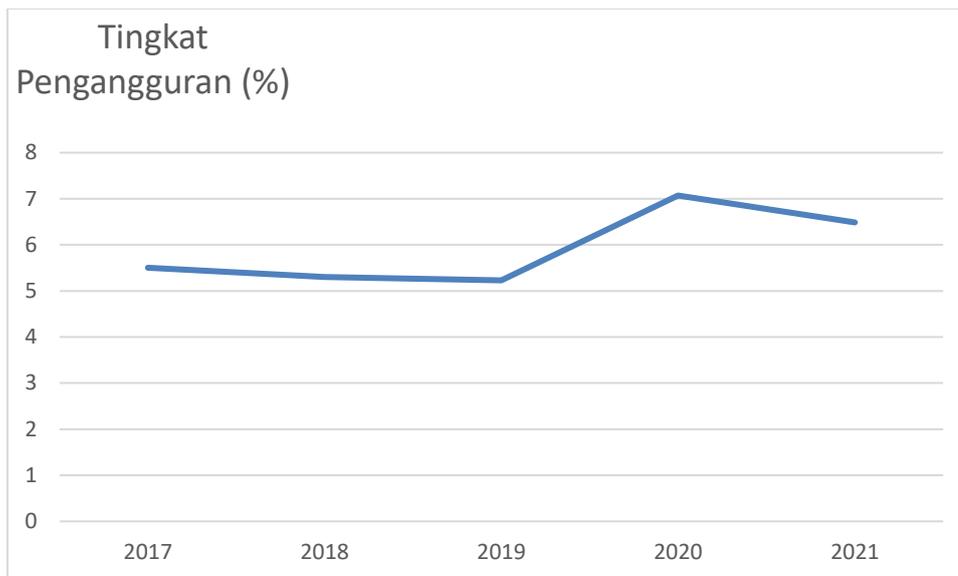
**Kata Kunci:** Upah Minimum, Pengangguran, Kalimantan Barat.

## **PENDAHULUAN**

Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan perkara yang sangat dianjurkan yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Selain itu, dengan pekerjaan yang baik dan mulia, manusia dapat melakukan banyak hal, termasuk dapat beribadah secara optimal. Islam mengajak pengikutnya untuk bekerja dengan diiringi bingkai keimanan karena segala sesuatu yang dikerjakan di dunia pasti akan mendapatkan balasan sebagaimana dimaktubkan di dalam surah At-Taubah ayat 105. Di dalam tafsir Kementerian Agama RI, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk berikhtiar dengan segenap upaya dalam mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat dan halal agar dapat menyaksikan penghargaan (balasan) yang akan Allah hadiahkan kepadanya atas pekerjaannya itu. Selain itu, apa yang diusahakan di dunia, akan dipertanggungjawabkan di kehidupan akhirat yang kekal (Kemenag RI, 2022).

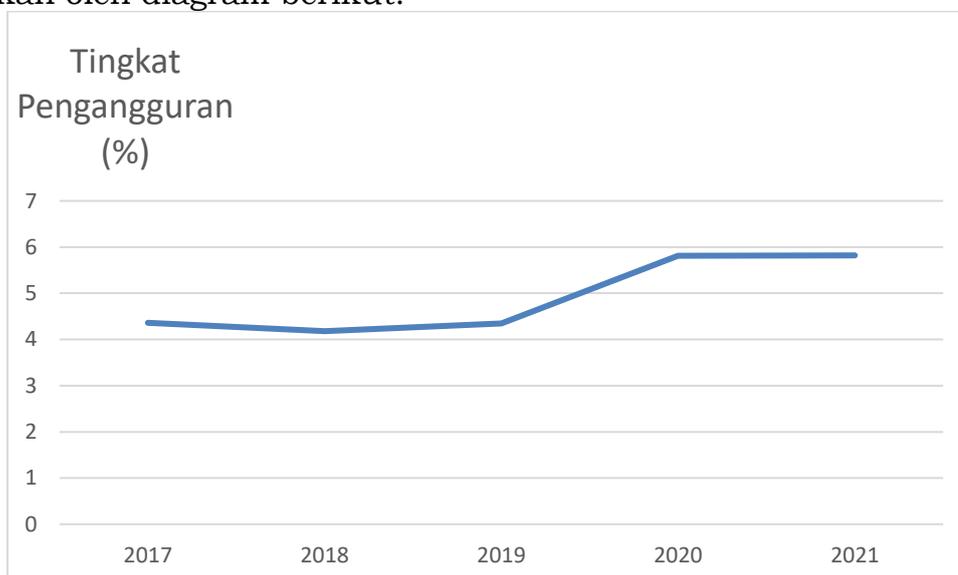
Pengangguran merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya, karena jika dibiarkan saja akan berdampak buruk baik kepada dirinya, keluarganya bahkan akan berdampak kepada negara. Orang yang manganggur akan menggantungkan dirinya kepada orang-orang produktif, sehingga akan menciptakan ketergantungan yang tinggi dan merosotnya pendapatan perkapita. . Jika ini berlangsung lama maka akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi (Novriansyah, 2018), yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018) . Hal inilah yang menyebabkan pengangguran harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh penambahan tenaga kerja baru yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia (Indayani & Hartono, 2020). Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia berfluktuatif. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,5%. Pada tahun-tahun berikutnya, tingkat pengangguran turun, hingga mencapai 5,23% pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020, tingkat pengangguran melonjak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu menjadi 7,07%. Angka tersebut turun lagi pada tahun 2021 (BPS, 2021). Fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam diagram berikut.



Gambar 1. Fluktuasi Tingkat Pengangguran di Indonesia dari tahun 2017-2021

Di Kalimantan Barat, tingkat pengangguran justru cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran berada pada angka 4,36. Angka tersebut turun menjadi 4,18 pada tahun berikutnya. Namun, angka tingkat pengangguran mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021, angka tersebut pada pada angka 4,82 (BPS Kalbar, 2021b). Besarnya tingkat pengangguran di Kalimantan Barat melebihi tingkat pengangguran alamiah. Grafiknya disajikan oleh diagram berikut.



Gambar 2. Tren Kenaikan Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021 (Data BPS Kalimantan Barat)

Dalam mengatasi pengangguran terlebih harus mengetahui faktor penyebab terjadinya pengangguran di suatu wilayah tersebut, agar mudah untuk memberikan solusinya. Menurut Mankiw, salah satu pengangguran struktural diakibatkan oleh upah minimum (Gregory Mankiw, Euston Quah,

Petere Wilson, 2008). Berdasarkan data empiris, upah minimum dapat memengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan peningkatan kerja di sektor informal (Nurhadi & Widyati, 2019). Hal ini didukung dalam penelitian Sunarsih dkk bahwa upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Sunarsih et al., 2019). Begitu juga menurut Jihad Lukis Pendawa bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran (Panjawa & Soebagiyo, 2014). Akan tetapi, berdasarkan penelitian Trimurti dan Komalasari, bahwa pada tahun 2014 upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di 7 provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Bali (Trimurti & Komalasari, 2014).

Dari latar belakang dapat dilihat bahwa upah minimum belum tentu memengaruhi suatu wilayah pada periode tertentu, sehingga sangat penting untuk melihat bagaimana variabel upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan variabel yang dijadikan sebagai objek penelitian, ditekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel dalam bentuk angka dan diselesaikan dengan statistik (Morissan, 2012). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa data Upah minimum sebagai variabel independen ( $X_1$ ) periode 2017-2021 dan data jumlah pengangguran sebagai variabel dependen ( $Y$ ) periode 2017-2021. Data-data yang diperoleh semua bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh merupakan data panel yaitu pada 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan periode 2017-2021. Kemudian data tersebut dianalisis dengan regresi sederhana dibantu aplikasi SPSS, dengan melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autoskedastisitas.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengangguran (*unemployment*)**

Pengangguran merupakan salah satu tolok ukur dalam menentukan baik buruknya perekonomian suatu negara. Pengangguran merupakan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Mankiw et al., 2014). Pengangguran juga diartikan sebagai penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi atau sedang menyiapkan usaha baru, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), ataupun penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja (Indayani & Hartono, 2020).

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibagi ke dalam tiga kelompok antara lain pengangguran konjungtur, pengangguran structural, dan pengangguran friksional. Pengangguran konjungtur disebabkan oleh kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Perubahan kegiatan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Jika kegiatan ekonomi meningkat

maka pengangguran rendah. Sebaliknya, jika kegiatan ekonomi menurun maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Dalam hal ini dapat dijelaskan secara mikro, pada saat perusahaan maju maka akan membutuhkan banyak karyawan atau tenaga kerja untuk pengembangan usahanya, sebaliknya pada saat perusahaan mengalami kemunduran maka akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja pada perusahaan tersebut (Parwoto, 2019).

Adapun pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi menyebabkan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan perusahaan dibutuhkan. Perubahan inilah terkadang tenaga kerja tidak siap, sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini lah yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Misalnya pergeseran ekonomi sektor pertanian menjadi sektor industri (Parwoto, 2019)

Selanjutnya, ada pengangguran friksional yang disebabkan oleh kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan yang tersedia. Misalnya pencari pekerjaan banyak di Semarang sedangkan lowongan pekerjaan banyak di luar Semarang. Selain itu diakibatkan oleh tidak tahunya letak dimana lowongan pekerjaannya dan perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan tersebut (Parwoto, 2019).

Sedangkan menurut Naf'an, beberapa penyebab terjadinya pengangguran di antaranya (Naf'an, 2014).

a. Penduduk relatif banyak dibandingkan lapangan pekerjaan

Jumlah penduduk yang tinggi akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak, sehingga jumlah angkatan kerja tidak tertampung dalam dunia kerja.

b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah

Pendidikan dan keterampilan yang rendah akan menghasilkan produktivitas yang rendah pula, sehingga perusahaan tidak akan menerima pekerja yang akan merugikan perusahaannya. Selain itu pendidikan di Indonesia tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia kerja.

c. Teknologi yang maju Teknologi yang tinggi tidak mengimbangi dengan kemampuan manusia, sehingga yang tidak menguasai teknologi tersebut akan tersingkir dalam persaingan.

d. Pengusaha yang ingin mengejar keuntungan Perusahaan yang hanya berpikir rasionalis, maka akan berusaha seoptimal mungkin dalam menggunakan tenaga kerja, agar mencapai target, sehingga tenaga kerja yang tidak bekerja tidak sesuai target akan di keluarkan dari pekerjaannya.

e. Faktor individu Faktor individu bisa dikarenakan sifat malas untuk bekerja, yang dapat disebabkan oleh gaji yang tidak layak, maraknya perjudian. Selain itu juga disebabkan karena cacat, banyak yang memiliki kekurangan fisik susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Di Kalimantan Barat jumlah pengangguran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Data Jumlah Pengangguran Kabupaten / Kota Tahun 2017 - 2021 (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Barat (BPS Kalbar, 2021)

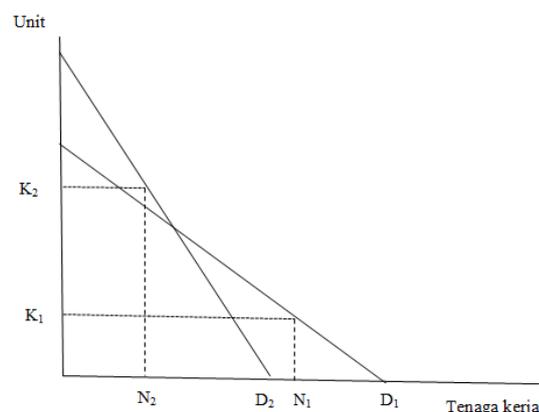
| Kabupaten / Kota | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sambas           | 10.944,00 | 8.873,00  | 9.640,00  | 10.879,00 | 11.534,00 |
| Bengkayang       | 2.995,00  | 3.163,00  | 3.506,00  | 5.513,00  | 5.858,00  |
| Landak           | 3.938,00  | 4.477,00  | 4.977,00  | 6.733,00  | 6.387,00  |
| Mempawah         | 7.887,00  | 8.261,00  | 6.141,00  | 9.478,00  | 9.302,00  |
| Sanggau          | 7.608,00  | 6.024,00  | 7.244,00  | 8.840,00  | 8.665,00  |
| Ketapang         | 8.346,00  | 7.685,00  | 10.855,00 | 17.044,00 | 17.523,00 |
| Sintang          | 3.969,00  | 4.870,00  | 6.782,00  | 10.512,00 | 9.625,00  |
| Kapuas Hulu      | 3.159,00  | 2.223,00  | 3.602,00  | 5.901,00  | 6.128,00  |
| Sekadau          | 741,00    | 3.048,00  | 3.506,00  | 3.950,00  | 3.179,00  |
| Melawi           | 2.360,00  | 3.401,00  | 2.731,00  | 3.118,00  | 3.056,00  |
| Kayong Utara     | 2.262,00  | 1.993,00  | 2.083,00  | 2.019,00  | 2.084,00  |
| Kubu Raya        | 15.041,00 | 12.698,00 | 15.006,00 | 20.758,00 | 20.633,00 |
| Kota Pontianak   | 27.889,00 | 30.272,00 | 27.311,00 | 37.405,00 | 39.251,00 |
| Kota Singkawang  | 7.922,00  | 7.530,00  | 6.888,00  | 9.411,00  | 10.082,00 |

Besarnya jumlah pengangguran, pemerintah harus mengetahui penyebab terjadinya pengangguran tersebut, supaya pemerintah dapat membuat kebijakan untuk membantu kaum pengangguran.

#### B. Upah Minimum

Dalam memahami pengangguran analisis upah minimum merupakan langkah awal untuk memahami sebagian alasan terjadinya pengangguran. Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Upah minimum adalah upah terendah (termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk upah lembur) yang dibayarkan oleh karyawan perjenis jabatan/pekerjaan. (BPS, 2013).

Upah minimum yang mengalami perubahan akan memengaruhi tingkat pengangguran, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. Hubungan penerimaan tenaga kerja terhadap Upah

Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa jika upah minimum dinaikkan maka akan terjadi perubahan permintaan tenaga kerja dari  $N_1$  ke  $N_2$ , yang berpengaruh pada pemakaian modal yaitu dari  $K_1$  menuju  $K_2$ . Akibat

perubahan upah minimum dan berdampak pada peningkatan modal sehingga akan memengaruhi perubahan permintaan tenaga kerja yaitu dari  $D_1$  menjadi  $D_2$  dalam hal ini terjadi pengurangan tenaga kerja, Pengaruh upah minimum pada jangka pendek yang dapat di lihat pada gambar 1, sangat cepat terhadap pengurangan tenaga kerja, akan tetapi pada jangka panjang maka akan dapat melakukan penyesuaian dengan menambah jumlah tenaga kerja yang lebih banyak (Andriyani, 2016).

Upah minimum di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Adapun upah minimum yang ada di Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 5. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 dalam Rupiah (BPS Kalbar (Diolah), 2021)

| Kabupaten / Kota | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sambas           | 2.022.800 | 2.200.000 | 2.377.000 | 2.580.000 | 2.600.000 |
| Bengkayang       | 2.013.450 | 2.189.000 | 2.364.777 | 2.566.019 | 2.566.019 |
| Landak           | 2.000.920 | 2.175.200 | 2.349.870 | 2.549.844 | 2.549.844 |
| Mempawah         | 1.901.005 | 2.066.600 | 2.232.600 | 2.422.594 | 2.422.594 |
| Sanggau          | 1.973.425 | 2.145.310 | 2.318.000 | 2.515.262 | 2.515.262 |
| Ketapang         | 2.478.000 | 2.439.300 | 2.636.000 | 2.860.323 | 2.860.323 |
| Sintang          | 2.025.000 | 2.215.000 | 2.393.000 | 2.596.644 | 2.596.644 |
| Kapuas Hulu      | 2.028.000 | 2.204.650 | 2.381.700 | 2.483.000 | 2.483.000 |
| Sekadau          | 1.931.180 | 2.009.386 | 2.267.970 | 2.461.000 | 2.461.000 |
| Melawi           | 1.948.500 | 2.118.214 | 2.288.306 | 2.483.040 | 2.483.040 |
| Kayong Utara     | 2.130.300 | 2.315.850 | 2.501.850 | 2.714.750 | 2.714.750 |
| Kubu Raya        | 1.907.400 | 2.075.000 | 2.242.000 | 2.433.000 | 2.433.000 |
| Kota Pontianak   | 1.972.000 | 2.145.000 | 2.318.000 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| Kota Singkawang  | 1.991.529 | 2.164.991 | 2.338.840 | 2.537.875 | 2.537.875 |

### C. Hasil Analisis Statistik

#### a. Statistik Deskriptif

Dilihat dari tabel 4 dan 5 bahwa upah minimum dan jumlah pengangguran di Kalimantan Barat dapat disajikan pada tabel di bawah ini (Data BPS diolah)

Tabel 6. Descriptive Statistics

|              | N  | Minimum    | Maximum    | Mean         | Std. Deviation |
|--------------|----|------------|------------|--------------|----------------|
| Upah Minimum | 70 | 1901005,00 | 2860323,00 | 2332194,6429 | 239443,22479   |
| Pengangguran | 70 | 741,00     | 39251,00   | 8924,5571    | 7991,71183     |

Dari tabel di atas dinyatakan bahwa rata-rata upah minimum 12 kabupaten dan 2 kota sekitar Rp. 2.332.194,6429 pada periode 2016-2021 dengan upah tertinggi yaitu Rp. 2.860.323,00 dan upah minimum

terendah sekitar Rp. 1.902.005,00. Adapun jumlah pengangguran rata-rata 8924,5571 jiwa dengan jumlah tertinggi sekitar 3.9251 jiwa dan paling sedikit sekitar 741 jiwa.

#### b. Uji Asumsi Klasik

Model regresi dikatakan baik apabila model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Setidaknya ada 3 uji yang dilakukan untuk regresi sederhana yaitu uji normalitas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autoskedastisitas (Ghazali, 2016).

##### 1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki residual berdistribusi normal atau tidak (Neoloka, 2014). Adapun dalam penelitian ini dapat dilihat gambar di bawah ini:

**Tabel 7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 70                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation | ,77162076               |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,096                    |
|                                  | Positive       | ,096                    |
|                                  | Negative       | -,039                   |
| Test Statistic                   |                | ,096                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,184 <sup>c</sup>       |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 7 di atas menyatakan bahwa nilai *Tes Statistic Kolmogorof Smirnof* yaitu  $0,096 > 0,05$  yang berarti data residual tersebut berdistribusi normal.

##### 2. Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini hasil uji heteroskedastisitas di bawah ini:

**Tabel 8. Coefficients<sup>a</sup>**

| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------------|---------------------------|---|------|
|-------|-----------------------------|---------------------------|---|------|

|              | B         | Std. Error | Beta  |       |      |
|--------------|-----------|------------|-------|-------|------|
| 1 (Constant) | 17,271    | 3,051      |       | 5,662 | ,000 |
| upah minimum | -5,876E-7 | ,000       | -,055 | -,452 | ,653 |

a. Dependent Variable: LN\_RES

Pada tabel di atas menyatakan bahwa nilai signifikansi yaitu  $0,653 > 0,05$  yang berarti tidak mengandung heteroskedastisitas.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ .

**Tabel 9. Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,329 <sup>a</sup> | ,108     | ,081              | 7712,55677                 | 1,815         |

a. Predictors: (Constant), LAG\_Y, upah minimum

b. Dependent Variable: pengangguran

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi linear antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t-1$ . Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson didapati  $DW_{hitung}$  dengan nilai 1,815. Dan diperoleh nilai tabel DW dengan “ $k=1$ ” dan “ $n=70$ ” adalah nilai  $dL$  (batas bawah) sebesar 1,5834 dan nilai  $dU$  (batas atas) sebesar 1,6413. Berdasarkan pedoman uji statistik Durbin-Watson, maka apabila  $DW_{hitung}$  terletak di antara ( $du < d < 4-du$ ), yaitu sebesar  $1,6413 < 1,815 < 2,3587$  Maka dapat disimpulkan model persamaan regresi tidak terindikasi terjadinya autokorelasi dan data dapat digunakan untuk penelitian. Karena nilai  $dU < d < 4-dU$  yaitu  $1,6413 < 1,815 < 2,3587$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi secara positif/negatif.

### c. Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini dianalisis dengan model regresi linear sederhana, dapat dilihat hasil SPSS uji  $t$  sebagai berikut:

**Tabel 10. Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                 | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)      | -14,774                     | 13,382     |                           | -1,104 | ,274 |
|       | LN <sub>X</sub> | 1,607                       | ,913       | ,210                      | 1,760  | ,083 |

a. Dependent Variable: LNY

Dari tabel 10 bahwa nilai signifikansinya  $0,083 > 0,05$  yang berarti bahwa upah minimum tidak memengaruhi jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021. Ketidakpengaruhannya antara upah minimum terhadap jumlah pengangguran diperkuat dengan penelitian Trimurti dan Komalasari bahwa pada tahun 2014 upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di 7 provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Bali.

Upah minimum di Kalimantan Barat tidak memengaruhi jumlah pengangguran, dalam hal ini Pemerintah harus dapat lebih melihat penyebab dari terjadinya jumlah pengangguran yang di Kalimantan Barat. Pengangguran di Kalimantan Barat bukan merupakan jenis pengangguran struktural, dikarenakan upah minimum tidak memengaruhi secara signifikan terhadap jumlah pengangguran pada periode 2017-2021.

Kemampuan model untuk variabel independen upah minimum dalam menjelaskan variabel dependen jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11. Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,329 <sup>a</sup> | ,108     | ,081              | 7712,55677                 | 1,815         |

a. Predictors: (Constant), LAG\_Y, upah minimum

b. Dependent Variable: pengangguran

Dari tabel di atas bahwa upah minimum sangat rendah dalam menjelaskan atau memengaruhi jumlah pengangguran, ditunjukkan nilai R square 0,108.

## **PENUTUP**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu 2017-2021 dengan metode regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak memengaruhi jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021. Hal ini terlihat dari besarnya nilai uji t  $0,083$  yang melebihi nilai signifikansi 5%. Oleh sebab itu, pengangguran di Kalimantan Barat bukan termasuk kategori jenis pengangguran struktural.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andriyani Devi. 2016. *Bahan Ajar Sumber Daya Manusia*. UNIMAL Press. <https://repository.unimal.ac.id>.
- Andriyani, D. (2016). *BAHAN AJAR EKONOMI SUMBERDAYA MANUSIA*. <https://www.coursehero.com/file/p7ivlgup/BAHAN-AJAR-EKONOMI-SUMBERDAYA-MANUSIA-DEVI-ANDRIYANI-SP-MSi-JURUSAN-EKONOMI/>
- BPS. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*. <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- BPS Kalbar. (2021a). *Penduduk Berumur 15+ (Angkatan Kerja) menurut Jenis kegiatan (Kab/Kota) (Jiwa), 2019-2021*. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/61/1/penduduk-berumur-15-angkatan-kerja-menurut-jenis-kegiatan-kab-kota-.html>
- BPS Kalbar. (2021b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota (Persen)*. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/51/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kab-kota.html>
- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Undip Press.
- Gregory Mankiw, Euston Quah, Petere Wilson. (2008). *Pengantar Ekonomi Makro*.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Perspektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.31294/jp.v18i2.8581>
- Kemenag RI. (2022). *Surat At-Taubah Ayat 105: Arab-Latin dan Artinya*. Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI / Surat At-Taubah Ayat 105 Referensi : <https://Tafsirweb.Com/3121-Surat-at-Taubah-Ayat-105.Html>. <https://tafsirweb.com/3121-surat-at-taubah-ayat-105.html>
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survei* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Graha Ilmu.
- Neoloka, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Novriansyah, M. A. (2018). *Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo | Arif Novriansyah | Gorontalo Development Review*. 1(1), 59–73.
- Nurhadi, Muh., & Widyati, D. (2019). *DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL: ANALISIS SPASIAL*. 9(1), 97–117.
- Panjawa, J. L., & Soebagiyo, D. (2014). *EFEK PENINGKATAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN*. 15(1), 48–54.
- Parwoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Rajawali Press.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.

- Sunarsih, Saleh, M., Huda, S., & Subagiarta, I. W. (2019). The Effect of Minimum Wage on Employment, Economic Growth and Social Welfare in the Ex Besuki Residency of East Java-Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(6), 82–89.
- Trimurti, C. P., & Komalasari, Y. (2014). *Determinants of Unemployment: Empirical Evidences from 7 Province in Indonesia by , , Scientific Research Journal (Scirj), Volume II, Issue VIII, August 2014 Edition. 2(8), 5–9.*